

3. KENDALA BAGI HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN PERS

Profesi jurnalisme digerakkan dengan kode etik yang dianut oleh jurnalisnya. Tetapi profesi ini tidak berada di ruang hampa. Struktur sosial yang menjadi ruang bagi institusi media jurnalisme dengan sendirinya ikut menentukan keberadaan profesi jurnalisme. Landasan hukum dan praktik politik dalam interaksi institusi media jurnalisme dengan institusi lainnya dalam struktur sosial selama belum berlandaskan paradigma yang mengakui hak warga dalam perspektif “*civil centered*”, akan menjadi kendala dan ancaman terus menerus terhadap keberadaan profesi dan media jurnalisme yang bertolak dari norma kebebasan pers.

Dalam masyarakat modern, hambatan atas kebebasan pers berasal dari kekuasaan negara, karena adanya hegemoni di seluruh sendi kehidupan. Dengan kata lain, ruang bagi media jurnalisme yang berada dalam situasi hegemoni, dengan sendirinya menjadi hilang. (O'Connor, 1990)

Norma otoritarianisme yang mewujud melalui kerajaan absolut, atau rezim yang secara jelas menjalankan sistem komunisme, ataupun fasisme, lebih mudah diidentifikasi atau dikenali. Sedangkan otoritarianisme yang hadir setelah Perang Dunia Kedua, lebih tersamar, sebab dalam pergaulan internasional seolah berada dalam kelompok negara-negara demokrasi. Karenanya hegemoni negara dapat dilihat melalui sejumlah indikator, yang menunjukkan adanya dominasi oleh penguasa terhadap warga masyarakat. Pada satu sisi menggunakan kekuatan dan kekerasan dalam mengendalikan warga masyarakat, pada sisi lain dominasi dilakukan melalui budaya, dengan menguasai alam pikiran warga masyarakat.

Dengan demikian keberadaan media massa menjadi lebih krusial, sebab jika berada dalam lingkup otoritarianisme klasik, segera dapat diketahui posisi dari suatu media. Dari sini konsep kebebasan pers dapat dilihat dalam kerangka yang jelas, apakah berada di dalam kekuasaan negara, atau berada di luar sebagai suatu subversi. Sedangkan dalam hegemoni negara melalui budaya, pengendalian media pers dilakukan melalui cara korporatisme, sehingga pengelola media pers dapat terkooptasi. Manakala berada dalam lingkup kooptasi ini, konsep kebebasan pers seolah dirumuskan bersama-sama antara jurnalis dari organisasi pers dengan penguasa dari birokrasi negara. Definisi bersama ini pada dasarnya berasal dari kekuasaan negara sebagai dasar dalam pengendalian kebebasan pers.

Kajian terhadap kebebasan pers dengan sendirinya akan menyinggung masalah kekuasaan dalam struktur kenegaraan. Anatomi dari kekuasaan dapat dilihat melalui struktur dan nilai budaya yang mendasari penyelenggaraan negara.

Terganggunya kehidupan sosial karena adanya orientasi budaya negara yang tidak mentoleransi adanya struktur alternatif yang bersifat oposisional. Dengan demikian dalam masyarakat hanya ada budaya mainstream dan counter-nya, sedang budaya negara tidak menyediakan tempat bagi orientasi yang bersifat alternatif.

Struktur resmi yang tidak memberi tempat kepada struktur alternatif atau oposisi karena digerakkan oleh budaya dengan norma militerisme dan fasisme. Dengan norma semacam ini, bahkan biasanya terbentuk struktur gelap (*hidden structure*) yang berasal dari struktur resmi negara. Struktur gelap ini digunakan untuk menjalankan tindakan secara fisik dan metode lainnya di luar hukum oleh penguasa negara untuk mematikan setiap tindakan yang dianggap sebagai oposisi. Selain itu pola-pola militerisme di lingkungan kehidupan sosial juga diperkembangkan. Kelompok-kelompok *para-military* yaitu orang sipil yang menggunakan atribut dan metode militer dalam kegiatannya, di sadari atau tidak, merupakan ciri dari struktur gelap yang dilegalisasi.

Mengapa diambil jalan melalui struktur gelap? Karena peniadaan oposisi jika melalui struktur resmi harus melalui lembaga yudikatif, sementara penguasa negara biasanya tidak dapat menunggu proses yang terlalu lama, atau kemungkinan masih ada hakim yang tidak terkooptasi oleh birokrasi negara. Untuk itu teror gelap, atau bahkan pembunuhan gelap atas diri warga masyarakat sering terjadi, dan ini dijalankan oleh personel dari struktur gelap.

Rezim negara yang digerakkan oleh norma militerisme dan/atau fasisme menjalankan prinsip monopoli mulai dari pengendalian secara fisik, sampai penguasaan alam pikiran warga. Pengendalian fisik antara lain dengan tindakan-tindakan uniformitas, sementara penguasaan alam pikiran dilakukan dengan monopolis wacana melalui penguasaan alat-alat komunikasi dalam masyarakat.

Militerisme dan fasisme dapat berjalan bersamaan, dan dapat berjalan terpisah. Militerisme pada dasarnya secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan yang menggunakan metode militer dalam kehidupan sipil. Metode militer atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai operasi militer, yang dijalankan dalam kehidupan perang merupakan bentuk politik yang paling akhir, setelah seluruh politik gagal dijalankan. Karenanya metode militer hanya boleh dijalankan dalam ranah perang yang dinyatakan secara hukum. Sementara di luar zona perang, hanya boleh dijalankan tindakan polisional. Untuk menjadikan suatu wilayah dan masyarakatnya berada dalam zona perang, harus ada dekrit hukum dari suatu negara. Dekrit hukum inipun masih dapat dinilai dalam konteks hukum internasional, apakah memang memiliki dasar yang kuat.

Metode militer yang digerakkan dengan norma fasisme dapat menjadi sangat eksesif jika budaya negara ini digerakkan oleh pimpinan negara yang memiliki kecenderungan psikopatologis. Eric Fromm (1997) mencatat bahwa bertumbuhnya paham Nazisme yang menjadi dasar negara fasisme Jerman, bersumber dari kecenderungan psikologi. Dengan demikian kecenderungan pemimpin yang mengidap psikopatologis, berkombinasi dengan pengikut yang fanatik, menjadi faktor bagi negara fasis. Dengan kecenderungan-kecenderungan psikologis semacam ini dijelaskan mengapa warga masyarakat lebih suka berada di bawah kungkungan, tidak berani mengambil kebebasannya. Penguasa rezim fasis selalu menyebutkan kondisi ini terjadi karena warga masyarakat tidak atau belum siap untuk berdemokrasi. Ketidak-siapan untuk mengambil jalan demokrasi ini biasanya dikaitkan dengan kondisi warga yang kurang terdidik, atau tingkat kemiskinan, dan sebagainya yang berkaitan dengan variabel sosial lainnya.

Dengan cara lain ketidak-siapan suatu kelompok atau bangsa mengambil kebebasan sebenarnya perlu dijelaskan dari kecenderungan psikologis yang bersifat kolektif. Kecenderungan psikologis ini lebih jauh perlu dicari akar penyebabnya, yaitu dari struktur yang menekan, represi yang berlangsung secara intens dan jangka panjang sampai merasuk ke dalam ruang psikologis secara kolektif. Represi secara fisik muncul melalui penghukuman dengan cara yang sangat keras atas setiap tindakan yang digolongkan sebagai keluar dari sistem negara (struktur resmi). Atau lebih keras lagi melalui struktur gelap dengan intimidasi terhadap warga masyarakat, baik fisik maupun sosial, yang semuanya mengarah kepada tekanan psikologis yang bersifat terus menerus.

Selain yang berlangsung melalui struktur negara (resmi dan gelap), penguasaan alam pikiran warga masyarakat dilakukan dengan mengendalikan media massa. Media massa dijadikan oleh penguasa negara sebagai sarana pengendalian warga masyarakat. Dalam norma otoritarianisme umumnya dan fasisme khususnya pada dasarnya hanya menjadi alat bagi kekuasaan, bukan sebagai sarana masyarakat untuk mendapat fakta dan mengekspresikan dirinya. (McQuail, 1987)

Pengendalian media massa oleh penguasa negara bukanlah semata-mata untuk menguasai media tersebut. Tetapi lebih jauh adalah untuk menguasai alam pikiran warga masyarakat, untuk kemudian dalam pengendalian alam pikiran ini struktur negara yang bersifat monopolistik dapat berjalan. Dengan kata lain, baik mekanisme melalui struktur gelap, maupun pengendalian media massa, dimaksudkan pada ujungnya adalah untuk mengendalikan warga masyarakat.

Apa sebenarnya yang diharapkan dari terkuasainya alam pikiran warga masyarakat? Pada tahap awal mungkin dengan alasan pragmatisme pembangunan. Perlu ada keseragaman pemikiran, sehingga mengefisienkan dalam mobilisasi pembangunan. Pembangunan disini dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan kondisi ekonomi akibat masa lalu. Di Jerman masa Hitler untuk bangun setelah negara Prusia porak-poranda akibat Perang Dunia Pertama. Di berbagai negara yang baru lepas dari penjajahan, diperlukan untuk meningkatkan kondisi negara secara cepat. Jargon yang lazim terdengar adalah akselerasi atau percepatan pembangunan. Untuk percepatan ini struktur negara sama sekali tidak boleh digangu dengan orientasi dan alternatif pemikiran lainnya.

Tetapi dalam praktek politik, sulit membedakan antara mobilisasi warga untuk tujuan pembangunan, dengan tindakan represi yang bertujuan menghilangkan daya kritis masyarakat. Karena rezim semacam ini yang kemudian bersifat korup dapat menjalankan kekuasaan tanpa adanya kontrol dari masyarakat. Penyalah-gunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi elit kekuasaan dapat berlangsung dengan lancar, karena berada dalam lingkungan warga yang penuh ketakutan ataupun sebaliknya, sepenuhnya menganggap tindakan-tindakan penguasa negara memang benar adanya.

Media massa hanyalah “korban” karena berada dalam struktur yang tidak menghormat kebenaran yang berasal dari kenyataan. Kebenaran hanya boleh datang dari kekuasaan negara. Karenanya jika pada bagian 1 (PERS BEBAS ATAU KEBEBASAN PERS?) ditunjukkan bagaimana fakta dan informasi menjadi basis kerja dalam jurnalisme, sedangkan dalam sistem otoritarianisme fasis mekanis dalam kerja jurnalisme berada dalam sistem komunikasi.

Sumber kebenaran adalah dari ideologi negara. Ideologi negara ini secara praksis mewujud melalui tindakan-tindakan penguasa negara melalui struktur resmi, dan tindakan-tindakan person yang menggerakkan struktur gelap. Pada lingkup informasi, ideologi negara mewujud melalui jargon-jargon negara yang biasa dinyatakan oleh penguasa negara. Dalam pengertian yang umum, jargon adalah istilah yang mengandung makna teknis yang digunakan oleh sekelompok orang.

Setiap kelompok yang bekerja dalam kaidah-kaidah teknis yang khas memiliki jargon yang khas pula, yang digunakan untuk lingkungan sendiri. Berbeda halnya dalam lingkup struktur negara yang berdasarkan fasisme, jargon digunakan untuk menampung gagasan yang bersifat monopolistik.

Jargon negara menampung gagasan-gagasan yang berasal dari struktur negara. Media massa dengan sendirinya harus menggunakan jargon ini, sehingga dalam proses terus-menerus, setiap jargon identik dengan makna publik. Adapun makna publik adalah hal-hal yang dianggap atau diterima sebagai sesuatu yang benar oleh warga masyarakat. Dengan demikian terjadi monopoli kebenaran yang bersumber dari penguasa negara.

Sementara pada pihak lain, penguasa negara dalam menindas setiap oposisi, juga menerapkan sejumlah label (pencapaian) terhadap person yang digolongkan ke luar dari sistem resmi. Secara fisik, pelaku oposisi dicap sebagai kriminal sehingga terjadi kriminalisasi politik. Dengan kata lain, tindakan bersifat politik dari warga direduksir melalui lembaga kepolisian dan pengadilan sebagai tindakan kriminal. Label seperti “pengacau”, dengan mudah diterapkan kepada person yang digolongkan menentang

kekuasaan negara. Media massa menjadi penyalur dari label ini, sehingga dalam warga terbentuk konsep tentang musuh bersama.

Keberadaan rezim fasis dibangun melalui dua cara, yaitu paksaan (*coercion*) dan kekerasan, dan melalui metode propaganda media massa. Paksaan dan kekerasan dilakukan dengan tindakan-tindakan melalui struktur resmi maupun gelap. Mekanisme komunikasi ini pada dasarnya bergerak dalam pembentukan monopoli makna publik di satu pihak, dan pembentukan musuh bersama.

George Orwell (1949) menulis novel satiristik mengenai rezim otoritarianisme fasis. Kendati sebuah fiksi, pemikiran yang terkandung di dalamnya sangat tajam mengungkapkan bagaimana bekerjanya rezim fasis. Selain menggunakan mekanisme kontrol secara fisik, rezim ini juga menggunakan media dan sistem bahasa yang dirancang untuk menguasai alam pikiran. Tujuan dari pembentukan “bahasa baru” adalah memaksakan makna-makna sesuai dengan kekuasaan untuk menghancurkan makna-makna yang pernah dikenal oleh warga.

Bahasa baru (*Newspeak*) digunakan secara intensif sehingga melahirkan kamus untuk bahasa Ingsoc di negara Oceania yang diceritakan Orwell. Melalui kamus ini kata-kata yang dapat menampung gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai dengan penguasa, dihapus atau diganti maknanya. Dengan begitu pengendalian alam pikiran menjadikan warga masyarakat sebagai otomaton, sepenuhnya dapat dan harus dikendalikan oleh penguasa.

Dalam skala yang berbeda, manakala penguasa negara yang menggunakan bahasa sebagai alat dalam menguasai rakyatnya, maka media massa secara luas dan represif lebih dulu dikendalikan. Karenanya pengelola media pers atau jurnalis perlu waspada terhadap kekuasaan yang menghambat kebebasan pers. Hambatan terhadap kebebasan pers pada satu sisi tentulah dari struktur yang menekan seluruh warga, sehingga warga masyarakat berada dapat situasi monopoli makna publik. Permasalahan struktural semacam ini tentulah berada di luar ranah media pers.

Kebebasan pers memang bukan hanya menjadi urusan orang pers sendiri. Masalah struktural yang menjadikan masyarakat tidak memerlukan kebenaran yang berasal dari fakta sosial, sebab makna publik dimonopoli oleh penguasa negara, merupakan faktor yang meniadakan kebebasan pers. Sedang kebebasan pers yang berkaitan langsung dengan media adalah kekuasaan bersifat struktural yang berinteraksi dengan jurnalis, yang menyebabkan jurnalis terganggu dalam memproses fakta menjadi informasi. Dengan demikian masyarakat tidak dapat memperoleh informasi media, dan lebih jauh masyarakat tidak memiliki landasan dalam mencari dan menguji kebenaran.

Kekuasaan struktural dapat datang dari struktur resmi negara, seperti lisensi terbit, atau bentuk-bentuk sensor lainnya yang bersifat legal. Sedang struktur gelap negara dapat datang dari ancaman dan teror yang bersifat ilegal atau tidak berdasarkan hukum. Begitu pula dari tekanan struktural yang berasal dari kekuatan ekonomi, dapat menjadi faktor mengancam kebebasan pers. Tetapi selain itu kekuasaan dari manajemen perusahaan media tempat seorang jurnalis bekerja, dapat pula menjadi ancaman yang menghalangi kebebasan pers, sebab menekan jurnalis bekerja hanya demi kepentingan modal perusahaan tempatnya bekerja.

Jika jurnalis berusaha agar terbebas dari kekuasaan struktural, maka masyarakat perlu pula mengawasi media pers, untuk melihat sejauh mana terkooptasi oleh kekuasaan struktural. Dengan begitu perlu ada aktivitas dalam masyarakat yang melakukan upaya kritisisme terhadap muatan media pers, sehingga dapat diketahui apakah media pers hanya menjadi penyalur kepentingan dari kekuasaan tersebut.

Dari sini dapat dibayangkan pentingnya upaya menjaga kebebasan pers. "Musuh" yang mengancam kebebasan pers, pertama bersifat internal yaitu jurnalis dan pengelola media pers, berupa penyalah-gunaan media pers demi kepentingan-kepentingan pragmatis sendiri. Kedua bersifat eksternal yaitu kekuasaan (negara dan modal) yang berpretensi menggunakan media pers untuk kepentingan sendiri, sehingga media pers bukan sebagai forum bebas bagi kebenaran, tetapi hanya menjadi alat untuk merekayasa masyarakat.

Dengan demikian upaya menjaga dan mengembangkan kebebasan pers ditempuh melalui sikap kritis dalam menghadapi keluaran media massa di tengah masyarakat di satu pihak, dan memberikan perhatian dan perlindungan bagi jurnalis yang menjalankan jurnalisme bebas pada pihak lain. Kegiatan ini terdiri atas 2 kelompok besar, pertama berupa langkah pengawasan dan monitoring terhadap tampilan media massa (*media watch*). Dan kedua, perlindungan terhadap jurnalis (*protect for journalist*) dalam menjalankan tugas jurnalisme dalam standar profesional. Kedua macam ini perlu dijalankan secara simultan di seluruh Indonesia, untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam norma kebebasan pers. Pentingnya program ini lebih-lebih mengingat kerasnya tekanan kekuasaan negara terhadap kebebasan pers, dan meluasnya sikap submisif di kalangan jurnalis dalam situasi kooptasi negara selama rezim Orde Baru.

Belanjut ke: PENUTUP